

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi menggambarkan hubungan kontraktual antara pihak pemberi amanah (*principal*) dan manajer (*agent*), di mana pemilik memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen untuk bertindak atas nama mereka. Dalam hubungan ini, *principal* memberikan kepercayaan kepada *agent* untuk menjalankan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kepentingan *principal*.

Hubungan keagenan merupakan pembagian kewenangan dimana pihak *principal* memberikan mandat kepada *agent* untuk melaksanakan program kerja dan mengambil keputusan atas nama *principal*. Namun, dalam penerapannya di sektor pemerintahan, teori agensi tidak sesederhana konsep konvensional karena terdapat perbedaan ideologi organisasi. Menurut Moe dalam Wardani (2021), sektor publik berorientasi pada peningkatan *social welfare* dengan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan individu, sedangkan hubungan keagenan konvensional lebih berlandaskan ideologi kapitalisme yang menonjolkan kepentingan pribadi (*self-interest*). Di Indonesia, praktik hubungan keagenan secara tidak sadar telah diterapkan pada sektor publik, di mana rakyat berperan sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agent*. Dalam konteks pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan desa, rakyat memberikan mandat kepada kepala desa dan aparatur desa untuk mengelola sumber daya serta mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat luas (Prayoi, 2019).

Sementara itu, menurut Mardiasmo (2018), dalam sektor publik, penerapan teori agensi dapat dilihat melalui pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai alat kontrol terhadap agen. Transparansi berperan dalam menyediakan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat, akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah desa atas tindakan dan penggunaan anggaran, sedangkan partisipasi masyarakat memungkinkan adanya keterlibatan langsung dalam perencanaan dan pengawasan keuangan desa.

Implementasi teori agensi terkait penelitian ini berfokus untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Teori agensi ini menjelaskan bahwa individu-individu atau pejabat-pejabat pemerintahan harus bertindak secara objektif dan transparan dalam pengelolaan keuangan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dan meningkatkan kinerja serta akuntabilitas. Sistem pelaporan yang baik juga penting untuk mencatat penjelasan mengenai penyebab penyimpangan dan waktu yang dibutuhkan untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan.

2.1.2 Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Laporan Keuangan

Kepercayaan adalah tindakan seseorang yang berharap orang lain dapat memberikan dampak positif, hal ini terjadi karena orang yang menerima kepercayaan diharapkan mampu memberikan manfaat dan memenuhi keinginan dari orang yang memberikan kepercayaan tersebut (Sabriyansah, 2025). Dalam konteks pemerintahan desa, menurut Kurniasih dalam Iqbal & Riyadi (2025), kepercayaan masyarakat tidak hanya dibentuk oleh hasil program pembangunan, tetapi juga oleh proses partisipatif, transparansi anggaran, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana

publik. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa merujuk pada tingkat keyakinan mereka terhadap kemampuan, integritas, dan komitmen pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Ulya & Hasbi, 2025). Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menyusun laporan keuangan secara jelas, sistematis, dan tepat waktu, serta memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun moral kepada masyarakat.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Arista *et al.*, (2023), Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas dalam suatu periode tertentu. Laporan ini disusun berdasarkan data akuntansi dan digunakan sebagai alat untuk menilai kesehatan keuangan, efisiensi operasional, dan akuntabilitas suatu organisasi atau perusahaan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Bagi sektor publik seperti pemerintah daerah, laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan negara.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa memberikan pedoman yang jelas mengenai mekanisme penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban desa, Tata kelola desa yang baik, yang berlandaskan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, merupakan pilar utama bagi tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan. Penelitian Ulya & Hasbi (2025) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat, masyarakat lebih cenderung percaya pada pemerintah desa yang mengelola keuangan secara terbuka dan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara jelas. Keterbukaan dan pengelolaan tata kelola desa yang baik akan

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam mendukung Pembangunan (BJB.Kemenkeu, 2024).

2.1.3 Transparansi

Transparansi adalah sebuah prinsip yang menuntut suatu organisasi atau entitas untuk bersikap terbuka kepada publik, dengan tujuan memberikan akses terhadap informasi yang benar, jujur, dan merata mengenai proses operasionalnya. Keterbukaan ini tetap harus diimbangi dengan menjaga perlindungan terhadap hak privasi individu, kelompok, serta kerahasiaan negara (Wulandari, N.A & Sujatmika, 2024). Mardiasmo dalam Ardelia (2022) Kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa harus diketahui oleh pihak berwenang, transparansi berarti keterbukaan (*openness*), yaitu pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Transparansi juga menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, karena dapat mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Namun demikian, keterbukaan ini tetap harus dijalankan secara proporsional dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap data sensitif dan kepentingan tertentu yang bersifat rahasia. Dengan demikian, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga sarana strategis untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan dipercaya oleh masyarakat.

Menurut Nupus (2021), terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan transparansi, yaitu:

1. Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap dokumen, yaitu sejauh mana masyarakat dapat mengakses dokumen yang memuat informasi terkait anggaran, kebijakan, dan laporan.
2. Kejelasan serta kelengkapan informasi, di mana informasi yang disampaikan harus disusun secara jelas, mudah dipahami, dan mencakup semua aspek penting yang diperlukan.
3. Keterbukaan informasi, yakni adanya kesempatan bagi publik untuk mengakses informasi yang relevan dan signifikan.
4. Adanya regulasi yang mendukung transparansi, yaitu peraturan atau kebijakan hukum yang dirancang untuk memastikan bahwa lembaga pemerintah maupun organisasi lainnya beroperasi secara terbuka dan dapat dimintai pertanggungjawaban.

2.1.4 Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo dalam Pratiwi (2022), akuntabilitas merupakan bentuk komitmen untuk menyampaikan hasil pencapaian maupun kegagalan dalam pelaksanaan tujuan organisasi melalui media pertanggungjawaban yang disusun secara periodik. Akuntabilitas tidak hanya menekankan pada keberhasilan dalam pelaksanaan program, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab atas proses yang dijalankan dan hasil yang diperoleh. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi landasan penting dalam membangun sistem yang transparan, terbuka terhadap evaluasi, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Konteks pemerintahan, khususnya pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas merupakan bagian dari prinsip *good governance* yang menuntut pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik secara administratif dan teknis. Pemerintah desa berkewajiban melaporkan setiap penggunaan dana

secara terbuka, jujur, dan tepat sasaran guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban bagi pihak yang telah diberikan mandat untuk melaksanakan kebijakan dan memberikan laporan atas pengelolaan serta pengendalian sumber daya secara transparan dan bertanggung jawab (Andrea & Handayani, 2022). Oleh karena itu, akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pelaporan administratif, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

Menurut Martriwanly (2017), Indikator yang menunjukkan tercapainya akuntabilitas meliputi:

- a. Adanya peningkatan kepercayaan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap cara pemerintah desa mengelola keuangan.
- b. Meningkatnya kesadaran warga mengenai hak mereka untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan desa.
- c. Menurunnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam lingkungan pemerintahan desa.

2.1.5 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak secara langsung dimana melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya (Pebrianti, 2021). Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi dilandaskan atas kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Putri, A.R. & Maryono, 2022).

Keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, karena partisipasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian aspirasi, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dianggap sangat penting, sebab pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat membuka peluang bagi mereka untuk terlibat secara aktif dalam mengarahkan penggunaan sumber daya, menggali potensi lokal, merancang program, mengambil keputusan, hingga melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan. Dengan adanya peran serta tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang diberdayakan demi tercapainya kesejahteraan bersama (Hasmira, 2017).

Menurut Sulaeman *et al.*, (2019), Indikator Partisipasi Masyarakat mencakup beberapa aspek penting meliputi :

- a. Keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan
- b. Peran aktif dalam pelaksanaan kegiatan langsung dalam menjalankan program
- c. Keikutsertaan dalam menerima manfaat yang berarti masyarakat turut merasakan hasil atau dampak dari kegiatan yang dilakukan
- d. Keterlibatan dalam proses evaluasi dengan berpartisipasi dalam menilai dan memberikan masukan terhadap hasil pelaksanaan program untuk perbaikan di masa mendatang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini antara lain:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

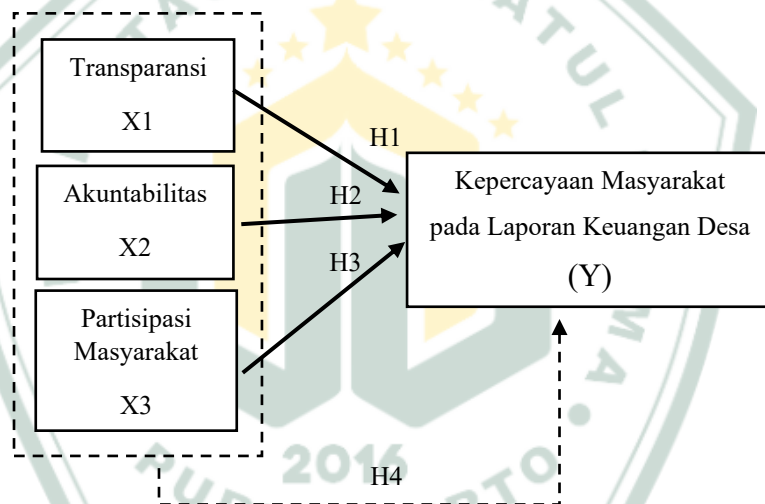
NO	Nama Peneliti & Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Hafiez Sofyani, Afrizal Tahar (2021)/ Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sedangkan variabel Transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat Desa di Kabupaten Bantul	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi kepercayaan masyarakat Desa di Kabupaten Bantul
2.	Norni Oktavia (2020) / Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, variabel Akuntabilitas berpengaruh terhadap variabel kepercayaan masyarakat, dan variabel Transparansi berpengaruh terhadap variabel kepercayaan masyarakat	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma
3.	Muhammad Iqbal, Ahmad Riyadi (2025) / Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Desa Dan Transparansi Anggaran Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Di Kecamatan Bojongsoang	Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel Akuntabilitas keuangan desa memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan Masyarakat dan variabel Transparansi anggaran berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kepercayaan Masyarakat.	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi anggaran mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung

	Kabupaten Bandung		
4.	Zahrohtun Haniah, Selly Puspita Sari (2025)/ Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Parerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu	Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel Akuntabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat kemudian Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana Akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi kepercayaan masyarakat di Desa Parerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu
5.	Sabriansyah (2025)/ Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Di Desa Mangki Kabupaten Pinrang	Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel Transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat sedangkan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana transparansi, akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Mangki Kabupaten Pinrang
6.	Linda Rahmah, Wahyudin Nor (2025)/ <i>Building Community Trust: The Effect of Accountability, Transparency, and Community Participation in Village Fund Management</i>	Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik, sedangkan variabel Transparansi tidak berpengaruh terhadap kepercayaan publik	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana, Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi masyarakat mempengaruhi kepercayaan masyarakat.
7.	Dhafin Taufiqi dan Kurnia Rina Ariani	Berdasarkan hasil penelitian bahwa	Fokus penelitian ini adalah tentang

	(2022)/ <i>The Effect of Good Governance, Accountability, and Transparency of Village Funds on Public Trust</i> Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.	variabel <i>good governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat, kemudian dan variabel transparansi dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.	bagaimana <i>good governance</i> , akuntabilitas, dan transparansi dana desa mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat Desa Grudo Kecamatan Ngawi variabel akuntabilitas dana desa berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat Kabupaten Ngawi
8.	Ikhsan, Faizal Satria Desitama (2023)/ Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa Pojok Kecamatan Campurdarat , Kabupaten Tulungagung	Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat dan pengelolaan dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan pendapatan asli daerah mempengaruhi Kepercayaan masyarakat Desa Pojok Kecamatan Campurdarat , Kabupaten Tulungagung
9.	Arlinda Luthfia Pratiwi, Mirza Anindya Pangestika 2025/ Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Laporan Keuangan Desa Pendawa Kabupaten Tegal	Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan Desa Pendawa dan variabel Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan Desa Pendawa.	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan Desa Pendawa Kabupaten Tegal

10.	Moh Abdul Azis, Itat Tatmimah, dan Muzayyanah 2025/ Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Responsiveness Pengelolaan Dana Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat di Desa Bojong Kulon	Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat kemudian variabel transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dan variabel responsivitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.	Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana Akuntabilitas, Transparansi, Responsiveness Pengelolaan Dana mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Masyarakat di Desa Bojong Kulon.
-----	--	---	--

2.3 Kerangka Konseptual



Keterangan :

X1 = Variabel bebas

X2 = Variabel bebas

X3 = Variabel bebas

Y = Variabel terikat

— = Pengaruh Parsial
 - - - = Pengaruh Simultan

2.4 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Transparansi Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Laporan Keuangan Desa.

Variabel transparansi dalam pengelolaan keuangan desa berkaitan dengan teori keagenan, karena transparansi membantu mengurangi ketimpangan informasi antara masyarakat sebagai (*principal*) dan pemerintah desa sebagai (*agent*).

Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat memantau penggunaan dana secara langsung, sehingga meningkatkan kepercayaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Transparansi adalah keterbukaan (*open process*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2003).

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Moh Abdul Azis, *et al.*, (2025) dan Indah Pratiwi Lihawa, *et al.*, (2025) menunjukkan hasil penelitian bahwa transparansi berpengaruh dalam tingkat kepercayaan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas yang menjadi pendukung penentuan hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : transparansi berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan Desa Karanggedang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.

2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Laporan Keuangan Desa.

Akuntabilitas berkaitan erat dengan teori keagenan karena keduanya membahas hubungan antara masyarakat sebagai pemberi

mandat (*principal*) dan pemerintah desa sebagai pelaksana mandat (*agent*). Dalam teori keagenan, sering muncul masalah karena adanya perbedaan informasi antara agen dan prinsipal, di mana agen cenderung lebih menguasai informasi terkait pengelolaan keuangan. Hal ini bisa menimbulkan penyimpangan, seperti ketidakterbukaan atau penyalahgunaan dana desa. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan akuntabilitas. Akuntabilitas berfungsi sebagai alat pengendalian agar agen bertanggung jawab terhadap tindakannya dan memberikan laporan keuangan secara transparan kepada masyarakat.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui sebuah media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, (Mardiasmo, 2014).

Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafa Nesya Ardelia & Nur Handayani (2022) dan Novia Rosy Pratiwi *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh serta signifikan dalam tingkat kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan desa. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan di Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Laporan Keuangan Desa.

Variabel partisipasi masyarakat berkaitan dengan teori keagenan karena partisipasi berperan sebagai mekanisme pengawasan masyarakat (*principal*) terhadap pemerintah desa (*agent*). Dalam teori keagenan,

konflik kepentingan dan ketimpangan informasi dapat diminimalkan jika masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan keuangan desa.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi, mengurangi potensi penyimpangan, dan memperkuat kepercayaan terhadap kinerja agen. Menurut Tahir *et al.*, (2020), partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan aktif anggota masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan atau proyek yang dilakukan bersama. Keterlibatan ini mencerminkan kesiapan dan kemauan masyarakat untuk berkontribusi dalam menjalankan program pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan. Mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia tidak selalu sebanding dengan jumlah program atau proyek yang direncanakan, maka peningkatan partisipasi masyarakat menjadi strategi penting untuk mendukung keberhasilan implementasi pembangunan di tingkat desa.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Andika Subandara *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh dalam tingkat kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan desa. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Aulia Rakhma Larasati Putri & Maryono, (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh dalam tingkat kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan desa. Berdasarkan uraian di atas yang menjadi pendukung penentuan hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H3 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan di Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap.

4. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Laporan Keuangan Desa.

Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan berkaitan dengan teori keagenan. Teori ini penting karena menjelaskan hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah desa sebagai agen, serta bagaimana mekanisme kontrol seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dapat meningkatkan kepercayaan dengan mengurangi risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Prayogi, R (2019), kepercayaan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepercayaan politik (*political trust*) dan kepercayaan sosial (*social trust*). Kepercayaan politik adalah keyakinan masyarakat terhadap pemerintah dan institusinya, termasuk proses pembuatan kebijakan secara umum maupun terhadap individu pemimpin politik. Kepercayaan ini terbentuk ketika masyarakat menilai bahwa pemerintah atau pemimpin tersebut mampu memenuhi janji dengan cara yang efisien, adil, dan jujur. Sedangkan *social trust* adalah kepercayaan yang merujuk pada masyarakat yang saling percaya antar anggota komunitas sosial satu dengan lainnya (Putra, M. A. R. 2013).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dhafin Taufiqi (2022) dan Moh Abdul Azis (2025) menunjukkan bahwa secara simultan variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan desa).

H4 : Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan Desa Karanggedang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.